

**PENGARUH PAJAK HOTEL, HIBURAN DAN REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



NAMA : FIRDAUS

NIM : 222010033

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2014

**PENGARUH PAJAK HOTEL, HIBURAN DAN REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : FIRDAUS

NIM : 222010033

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus

NIM : 22 2010 033

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus2014

Penulis



Firdaus

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

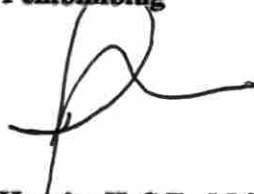
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PENGARUH PAJAK HOTEL, HIBURAN DAN REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

Nama : **Firdaus**
NIM : **22 2010 033**
Fakultas : **Ekonomi**
Jurusan : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Perpajakan**

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal,**

Pembimbing



Hasyim H. S.E., M.Si
NIDN: 0012036101

**Mengetahui
Dekan**

u. b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E. Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Berusaha dan Berdo'a Untuk Mencapai Keberhasilan Dunia dan Akhirat, amin ya rabbal alamin"

Skripsi inikupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibundaku tercinta
"Ali dan Rosdiana"*
- *Istri dan anakku yang tersayang
"halimah tusa'diah dan M.ozil
firdaus"*
- *Keluargaku yang aku cintai
dan Adik-adikku yang tersayang*
- *Pembimbing skripsiku, dosen-
dosen FE UMP dan guru-guruku*
- *Sahabat - sahabat yang selalu ada
dan selalu memberi semangat dan
motivasi*
- *Almamaterku*

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmadNYA penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting sebagai penerimaan kas negara dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi pajak yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang di daerah nya untuk digali dan dioptimalkan.

Pajak hotel, hiburan dan reklame merupakan bagian pajak daerah yang juga harus diperhatikan dalam melihat potensi-potensi pajak yang ada khususnya di kota Palembang sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Palembang. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk melihat seberapa besar Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Adapun penulisan laporan penelitiannya dibagi menjadi lima Bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada

kedua orang tua yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Hasyim, H., S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberi masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing akademik.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Amin

Palembang, Agustus 2014

Penulis

Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya	11
B. Landasan Teori	12
1. Pengertian Pajak.	12
a. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak.	12
b. Fungsi Pajak	14
c. Azas pemungutan pajak	16
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.	19
3. Pendapatan Asli Daerah.	23

C. Hipotesis	25
---------------------------	-----------

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Operasionalisasi Variabel	27
D. Data yang Diperlukan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Analisa Data dan Teknik Analisis	29
1. Analisis Data	29
2. Teknik Analisis	30
a. Regresi Linier Berganda	30
b. Koefisien Determinasi	30
c. Uji Koefisien Korelasi	31
d. Uji Hipotesis	32
1) Uji secara Bersama (Uji F)	32
2) Uji secara Parsial (Uji t)	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	35
2. Struktur Organisasi	36
a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan	36
b. Susunan Organisasi	37
c. Tugas dan Fungsi	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN	68
B. SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak Hotel, Hiburan dan Biro Reklame Tahun 2009-2013	6
Tabel I.2 Penerimaan Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2009-2013.....	7
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya.....	11
Tabel III.1Operasionalisasi Variabel.....	23
TabelIV.1Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Dearah kota Palembang Tahun Anggaran 2009- 2013.	46
Tabel IV.2 Hasil Korelasi Berganda.....	48
Tabel IV.3 Hasil Analisis Korelasi Secara Parsial.....	49
Tabel IV.4Hasil Analisis Regresi	50
Tabel IV.5Uji ANOVA.....	53
Tabel IV6 Tabel <i>Coeficient</i>	54
Tabel IV.7Hasil Koefissien Korelasi Berganda.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	39
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Penyelesaian Riset**
- II. Data SPSS**
- III. Surat Bimbingan Skripsi**
- IV. Sertifikat Lulus dan Mengaji Al-qur'an**
- V. Sertifikat Toefl**
- VI. Identias Penulis**

ABSTRAK

Firdaus /222010033/ pengaruh Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan Uji F secara bersama tidak ada pengaruh signifikan antara Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Variabel Pajak Daerah hotel T hitung (3,870) > T table (2,003), oleh karena itu ada pengaruh signifikan antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kota palembang, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Variabel Pajak Hiburan T hitung (2,027) > T table (2,003) oleh karena itu tidak ada pengaruh signifikan antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang maka H_o diterima dan H_a ditolak, variabel pajak reklame T hitung (0,160) < T tabel (2,003) oleh karena itu tidak ada pengaruh signifikan antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota palembang, maka H_o diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui sebesar 26,7% Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dipengaruhi oleh pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, sedangkan variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 73,3%.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Firdaus /222010033/ The Influence of the hotel tax, the entertainment tax, and the advertisement tax on the Local Revenue of Regional Income Department in Palembang.

The problem of this study was how the hotel tax, the entertainment tax, and the advertisement tax simultaneously and partially influenced the local revenue of regional income department in Palembang.

Based on the simultaneous F test, it showed that there was significant influence of the Hotel Tax, Entertainment Tax and Advertisement Tax to the Local Revenue of Palembang.

For the hotel tax variable, it showed that $t_{obtained} (3.870) > t_{table} (2.003)$, it means there was significant influence of the hotel tax the Local Revenue of Palembang. Then, H_a was accepted and H_o was rejected. For the entertainment tax variable, it showed that $t_{obtained} (2.027) > t_{table} (2.003)$ it means there was significant influence of the entertainment tax on the local revenue of Palembang. Then, H_a was accepted and H_o was rejected, for advertisement tax variable, it showed that $t_{obtained} (0.160) < t_{table} (2.003)$. it means there was no significant influence of the advertisement tax on the local revenue of Palembang. Then, H_o was accepted, and H_a was rejected.

Based on the determination coefficient calculation, it showed that 26.7% of the local revenue of Palembang was influenced by the hotel tax, the entertainment tax, and the advertisement tax, while other variable excluded in this study gave contribution 73.3 %

Keywords: Hotel Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax and Local Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia telah lama mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus - menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri digunakan hanya sebagai pelengkap.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata

diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah hal ini tidak terlepas dari keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang No 22 tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut undang-undang No. 34 tahun 2004 adalah : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) pendapatan asli daerah yang sah, 2) dana perimbangan, 3) pinjaman daerah, 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, tapi pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil, agar lebih mandiri pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah.

Kota Palembang berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah : 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan / Bahan Galian C, 7) Pajak Parkir, 8) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang

Burung Walet, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk di gali dan di optimalkan.

Pertaturan daerah nomor 11 tahun 2010 pajak hotel merupakan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah atas penyelenggaraan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel seperti fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel. Tarif pajak hotel sebesar 10 %. Perhitungan pajak hotel yaitu besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 pajak hiburan adalah pajak yang dipungut berdasarkan setiap pembayaran atas jasa penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut

bayaran. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dan wajib pajaknya adalah orang atau badan penyelenggara hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Cara perhitungan pajak hiburan yaitu besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar :

1. Tontonan film sebesar 10%
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana sebesar 20%
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25%
4. Pameran sebesar 10%
5. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30%
6. Sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10%
7. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 20%
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 35%

Peraturan daerah nomor 14 tahun 2010 Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajaknya semua penyelenggara reklame. Subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame berdasarkan nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%, pajak reklame juga dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media

reklame. Cara perhiungan pajak reklame anatar lain sebagai berikut: jenis reklame x jumlah reklame x indeks lokasi (nilai strategis) x ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah instansi pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian urusan dibidang pendapatan daerah salah satunya pendapatan dari pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah Palembang bertempat di lingkungan Kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka nomor 21 Palembang, dengan wilayah kerja meliputi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Luasnya wilayah kerja dan banyaknya wajib pajak yang harus didata membuat pekerjaan dinas satu ini semakin berat sehingga membutuhkan para pekerja profesional serta pantang menyerah dan mampu menolak godaan.

Tabel I.1

Jumlah wajib pajak hotel, Hiburan dan Biro Reklame tahun 2009-2013

Tahun	Hotel	Hiburan	Reklame
2009	130 WP	123 WP	28 biro
2010	145 WP	133 WP	42 Biro
2011	177 WP	129 WP	23 Biro
2012	164 WP	134 WP	26 Biro
2013	168 WP	138 WP	32 Biro

Sumber : dinas pendapatan daerah kota palembang, 2014

Hasil dari tabel 1 diatas bervariasinya jumlah wajib pajak sehingga sulit diidentifikasi apakah berpengaruh terhadap pendapatan masing-masing pajak dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penting bagi pemerintah daerah untuk melihat atau memperhatikan permasalahan dalam pemungutan pajak daerah, salah satu contoh yaitu dari hasil wawancara saya kebagian pendataan ternyata masih bnyak

potensi pajak yang belum optimal, baik pajak hotel, pajak hiburan maupun pajak reklame hal ini berkaitan dengan pelaporan pendapatan yang tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya dan masih ada potensi pajak yang lain yang belum optimal baik disektor pajak hiburan yang masih banyaknya pengelola tempat-tempat hiburan yang masih belum membayar pajak dan menyelenggarakan tanpa izin.

Tabel I.2

**Penerimaan Pajak Hotel, Reklame, Hiburan dan Pendapatan Asli
Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun	Bulan	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	PAD
2009	Januari	590.014.856	341.800.485	378.138.413	6.903.810.092
	Februari	501.269.743	280.538.595	266.863.723	7.077.405.243
	Maret	1.330.743.575	220.040.530	316.648.025	9.512.442.512
	April	876.215.927	439.815.105	423.177.152	7.820.766.465
	Mei	711.390.780	379.251.500	269.437.463	6.225.401.969
	Juni	1.017.201.709	360.363.525	486.133.656	8.251.875.903
	Juli	974.099.092	468.132.365	359.424.647	8.619.514.839
	Agustus	944.474.200	373.969.470	301.868.665	6.560.943.386
	September	477.237.391	303.625.625	304.423.206	8.512.585.294
	Oktober	881.587.873	300.507.039	474.813.281	9.876.248.434
	November	1.039.051.479	355.223.590	300.758.755	9.282.488.800
	Desember	1.010.460.999	538.890.675	343.595.848	13.749.247.804
2010	Januari	820.371.583	496.100.725	236.557.757	7.402.897.990
	Februari	913.485.054	437.370.745	297.828.998	7.812.560.320
	Maret	1.223.331.665	370.109.718	323.030.453	8.312.000.400
	April	1.544.439.857	417.194.978	405.618.033	7.982.720.020
	Mei	1.180.640.757	387.149.782	289.762.965	8.632.166.220
	Juni	1.260.273.685	547.485.764	602.034.100	8.880.640.500
	Juli	1.139.610.882	514.856.325	432.011.945	9.232.344.120
	Agustus	868.882.094	479.981.695	548.116.055	8.600.430.750
	September	988.354.732	358.116.903	337.267.686	9.112.077.312
	Oktober	1.481.373.814	390.018.694	305.876.022	10.675.783.201
	November	1.505.011.383	441.678.438	522.758.751	12.446.700.300
	Desember	1.168.925.099	273.043.972	302.677.398	14.116.112.640
2011	Januari	880.543.167	335.870.954	287.910.777	7.987.665.376
	Februari	953.667.772	370.899.900	296.348.080	7.992.554.906
	Maret	1.324.556.870	420.987.670	321.767.099	8.532.849.070
	April	1.432.667.887	421.088.776	370.886.774	8.945.822.963
	Mei	1.245.887.200	467.334.290	420.776.908	7.651.899.022
	Juni	1.136.780.965	517.866.340	348.077.690	8.653.908.267

	Juli	1.288.656.099	430.887.669	450.889.665	9.545.872.905
	Agustus	980.776.500	308.872.199	367.878.009	8.784.312.967
	September	1.020.995.667	459.865.012	328.667.070	9.693.546.209
	Oktober	1.256.389.902	376.909.776	387.977.665	11.076.549.802
	November	1.489.088.343	456.667.989	458.909.779	12.899.844.777
	Desember	1.345.890.767	478.900.719	378.856.432	14.698.397.690
2012	Januari	928.238.088	478.965.343	319.297.650	8.026.640.598
	Februari	956.440.882	437.659.725	365.954.088	8.129.653.077
	Maret	1.256.783.088	412.679.884	379.055.743	8.319.775.932
	April	1.439.855.409	385.466.780	479.640.045	7.886.432.009
	Mei	1.367.099.678	398.704.643	378.664.202	8.421.660.220
	Juni	1.236.788.656	412.788.044	356.883.900	9.543.210.335
	Juli	1.190.456.887	437.800.976	387.664.832	7.641.205.452
	Agustus	987.660.932	510.766.434	452.080.745	8.823.895.764
	September	1.004.765.900	392.558.664	367.088.453	9.774.269.712
	Oktober	1.576.820.110	405.773.122	378.456.180	11.290.615.395
	November	1.456.976.805	532.633.907	584.221.966	13.328.391.020
	Desember	1.238.904.336	327.755.432	408.654.981	15.910.289.576
2013	Januari	935.890.418	419.573.841	485.727.587	9.572.525.728
	Februari	957.627.792	534.653.785	587.957.525	8.353.762.545
	Maret	980.776.346	454.253.326	347.572.982	9.361.389.498
	April	1.453.798.848	390.768.210	359.592.592	9.376.643.636
	Mei	1.783.675.210	435.938.914	475.582.958	8.632.902.887
	Juni	923.138.358	578.194.599	494.578.934	8.116.878.390
	Juli	1.284.328.482	562.949.572	389.496.690	9.772.178.906
	Agustus	1.473.284.325	495.201.185	399.386.938	11.421.077.982
	September	1.933.535.114	591.275.957	498.658.567	12.917.834.088
	Oktober	942.719.490	574.981.375	319.834.952	14.672.883.008
	November	1.542.104.993	459.588.529	329.349.592	16.721.088.743
	Desember	1.784.349.829	539.493.259	530.423.895	17.456.956.067

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2014

Semua pemungutan pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Yang semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, khususnya pemerintah kota Palembang.

Hasil dari tabel 2 dilihat bahwa nilai pajak variabel bervariasi sehingga sulit diidentifikasi karena lebih berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) untuk itu diteliti dan diuji secara statistik untuk mengetahui pengaruh ke 3 (tiga) variabel tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pajak hotel, hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kota palembang secara simultan?
2. Bagaimanakah pengaruh pajak hotel,hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kota palembang secara parsial?
3. Upaya apa yang telah dilakukan pemerintah kota palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, hiburan dan pajak reklame?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pajak hotel, hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pajak hotel, hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, hiburan dan reklame di Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh secara simultan dan parsial pajak hotel, hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas pendapatan daerah kota Palembang mengenai sektor pajak hiburan, reklame dan hotel yang mempunyai kontribusi besar dalam pendapatan daerah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1

No.	Penulis / Judul	Hasil Penelitian	Relevan
1.	Febri Mandra ,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 / Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2011	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara Signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota palembang.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu jumlah variabel yang di teliti. Persamaan dengan Penelitian ini pada Tempat Penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
2.	Elita Dewi, Universitas Pasundan 2011 / Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2008 – 2012 pajak hiburan mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah kekuatannya sebesar 93,8% , besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar 45,52% hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan	Perbedaan dari penelitian ini yaitu objek yang diteliti. Persamaan penelitian ini yaitu Sama-sama menggunakan variabel Pajak hiburan
3.	Mawar Dwi Putranty, 2008 / Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Jakarta Barat Pada Tahun 2003-2007	Pajak reklame dan pajak restoran tidak Berpengaruh terhadap pendapatan asli Daerah karena masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Jakarta barat	Perbedaan dari penelitian ini yaitu objek yang diteliti Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pajak daerah.

Sumber : Penulis, 2014

B. Landasan Teori

1. Pengertian pajak

Rachmat Soemitro (2013 : 33) mengungkapkan bahwa, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Andiani (2013 : 33) , mengungkapkan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggaraan pemerintah.

Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

a. Unsur-unsur dan ciri-ciri pajak

berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri dan unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya iuran masyarakat kepada negara.

- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”

- 3) Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan

- 5) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Ciri-ciri pajak adalah :

- a) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari perseorangan atau badan ke dalam kas negara.
- b) Tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukan dalam pembayaran pajak secara individu.
- c) Dapat dipaksakan.

- d) Pemungutannya berulang-ulang atau sekaligus.
- e) Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- f) Pemungutannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
- g) Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat
- h) Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, termasuk kebijakan yang lazimnya disebut kebijakan fiskal
- i) Untuk dimasukkan ke dalam kas Negara

b. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1) Fungsi anggaran

Fungsi anggaran yaitu Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara serta melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang. Pemeliharaan dsb. Untuk pembiayaan

bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi mengatur

Fungsi mengatur yaitu Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi stabilitas

Fungsi stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Azas pemungutan pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1) Adam Smith (2009 : 28) dalam bukunya *Wealth of the Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a) Asas *Equality*

Asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b) Asas *Certainty*

Asas *certainty* (asas kepastian hukum) yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c) *Asas Convenience of Payment*

Asas convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d) *Asas Efficiency*

Asas efficiency (asas efisien atau asas ekonomis) yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak

2) W.J. Langen (2009 : 56) , asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a) *Asas daya pikul*

Asas daya pikul adalah besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

b) *Asas manfaat*

Asas manfaat adalah pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

c) Asas kesejahteraan

Asas kesejahteraan adalah pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d) Asas kesamaan

Asas kesamaan yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

e) Asas beban yang sekecil-kecilnya

Asas beban yang sekecil-kecilnya yaitu pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3) Adolf Wagner (2008 : 43) , asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a) Asas politik finansial

Asas politik finansial yaitu pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

b) Asas ekonomi

Asas ekonomi adalah penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

c) Asas keadilan

Asas keadilan adalah pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

d) Asas Administrasi

Asas administrasi yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

e) Asas yuridis

Asas yuridis adalah segala peungutan pajak berdasarkan hukum.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

1) Pengertian Pajak Hotel

Peraturan Daerah kota Palembang No. 11 tahun 2010 tentang Pajak Hotel menjelaskan pengertian pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah atas penyelenggaraan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

2) Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak hotel.

Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 11 tahun 2010 :

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel. Tarif pajak hotel sebesar 10 %. Perhitungan pajak hotel yaitu besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

b. Pajak Hiburan

1) Pengertian pajak hiburan

Peraturan daerah kota Palembang nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan menjelaskan pengertian pajak hiburan adalah pajak yang dipungut berdasarkan setiap pembayaran jasa penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburannya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburannya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburannya adalah orang atau badan penyelenggara hiburan.

2) Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak hiburan

Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 13 tahun 2010 pasal IV menjelaskan tentang dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak hiburan sebagai berikut :

a) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

b) Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar :

(1) Tontonan film sebesar 10%

(2) Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana sebesar 20%

(3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25%

- (4) Pameran sebesar 10%
- (5) Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30%
- (6) Sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10%
- (7) Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 20%
- (8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 35%

c) Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Cara perhitungan pajak hiburan yaitu besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

c. Pajak Reklame

1) Pengertian Pajak Reklame

Peraturan daerah kota Palembang nomor 14 tahun 2010 tentang pajak reklame menjelaskan pengertian pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2) Dasar Pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak reklame

Peraturan daerah nomor 14 tahun 2010 pasal IV tentang dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak reklame antara lain sebagai berikut :

- a) Dasar pengenaan pajak reklame berdasarkan nilai sewa reklame

- b) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%, pajak reklame juga dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- c) Cara perhiungan pajak reklame anataro lain sebagai berikut:
jenis reklame x jumlah reklame x indeks lokasi (nilai strategis) x ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- d. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang disalurkan oleh PLN maupun bukan PLN dengan ketentuan bahwa didaerah tersebut penerangan jalan yang rekeningnya dibayar pemerintah.
- f. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pemungutan atas bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

2) Pendapatan Asli Daerah

a) Pengertian pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yaitu pendapatan dari suatu daerah yang keseluruhannya diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah daerah dan hasil penyeteroran kekayaan yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang sah setiap tahunnya.

b) Sumber pendapatan asli daerah.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi:

(1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak.

- (2) **Retribusi Daerah** Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.

- (3) **Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah**

Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah adalah penerimaan berupa bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba bersih bank pembangunan daerah, bagian dari laba bersih perusahaan daerah.

- (4) **Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah**

Penerimaan dari dinas-dinas daerah adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan-penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya, penerimaan dari dinas pertanian, peternakan, dan dinas kesehatan.

- (5) **Penerimaan Lain-Lain**

Penerimaan lain-lain adalah penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan dari dinas-dinas. Misalnya, hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009:53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 21.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pajak Hotel (X_1)	Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan objek pajak nya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel.	Total Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2009-2013
2.	Pajak Hiburan (X_2)	Pajak Hiburan adalah pungutan daerah untuk setiap pembayaran jasa penyelenggaraan tempat hiburan, objek pajak nya adalah semua penyelenggaraan yang dipungut biaya	Total Pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2009-2013
3.	Pajak Reklame (X_3)	Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame, objek pajak nya adalah semua penyelenggaraan reklame	Total Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2009-2013
4.	Pendapatan asli daerah (Y)	Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah , pendapatan asli daerah yang sah serta hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	Total Penerimaan Daerah Tahun 2009-2013

Sumber : Penulis, 2014

D. Data yang diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primernya berupa data dan dokumen yang diperoleh dari Dinas pendapatan daerah dan data sekunder nya berupa data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, artikel dan literatur lainnya.

E. Teknik pengumpulan data

Sugiyono (2009: 402-405) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya;

3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada kepala seksi pengolahan data yang ada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, sedangkan dokumentasi dengan mengumpulkan data, tulisan atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2009 : 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diingkakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif.

2. Teknik Analisis

a. Regresi Linear Berganda

$$\text{Rumus : } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Asli Daerah

X₁ : Pajak Hotel

X₂ : Pajak hiburan

X₃ : Pajak Reklame

e : Standar Error

a : konstanta

b₁, b₂, b₃ : koefisien

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui uraian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi yaitu untuk mengetahui seberapa besar variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) yang dapat diterangkan oleh variabel Pajak Hotel (X₁), Pajak Hiburan (X₂) dan Pajak Reklame (X₃).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$R = (r^2) \times 100\%$$

c. Korelasi Linear Berganda

Korelasi merupakan tingkat hubungan antara variabel-variabel.

Menurut Anto dajan (2008: 20) persamaannya adalah:

$$r = \sqrt{\frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y}{\sum y^2}}$$

Koefisien korelasi memiliki nilai antara lain -1 dan +1 ($-1 < KK < +1$).

Jika KK bernilai positif maka variabel-variabel berkorelasi positif.

Semakin dekat nilai KK ke +1 semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya.

Jika KK bernilai negatif maka variabel-variabel berkorelasi negatif.

Semakin dekat nilai KK ke -1 semakin kuat korelasinya, demikian sebaliknya.

Jika KK bernilai nol maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi.

Jika KK bernilai +1 atau -1 maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna.

Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut, maka diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan.

$KK = 0$ tidak ada korelasi

$0 < KK \leq 0,20$ korelasinya sangat rendah

$0,20 < KK \leq 0,40$ korelasi rendah

$0,40 < KK \leq 0,70$ korelasi yang cukup berarti

$0,70 < KK \leq 0,90$ korelasi yang tinggi, kuat

$0,90 < KK \leq 1$ korelasi sangat tinggi, kuat sekali

$KK = 1$ korelasi sempurna

d. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui uji hipotesis maka digunakan rumus sebagai berikut:

1) Uji F, yaitu yang digunakan untuk menguji secara keseluruhan.

$$\text{Rumus : } F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

F = Uji hipotesis berganda

R = Nilai koefisien korelasi

K = Jumlah variabel bebas

n = Banyaknya sampel

H_{01} = tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap pendapatan asli Daerah kota Palembang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

H_{a1} = Ada pengaruh yang signifikan antara pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap pendapatan asli Daerah kota Palembang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Pengujian ini dilakukan untuk mendapat nilai F hitung yang kemudian dibandingkan dengan menggunakan standar α signifikan 5% (0,05) bila signifikan nilai F hitung lebih besar dari nilai signifikan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta apabila F -hitung lebih besar dari signifikan 0,50 maka H_0 diterima H_a dan ditolak dengan hipotesis sebagai berikut:

H_a diterima apabila F -hitung \geq dari F -tabel

H_0 ditolak apabila F -hitung $>$ dari F -tabel

- a. Uji T yang digunakan untuk menguji variabel secara parsial.

Untuk menguji pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rumus : } T = \frac{B_n}{S_n}$$

Keterangan :

B_n = koefisien regresi masing-masing variabel

S_n = Standar error masing-masing

H_{01} = tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap pendapatan asli Daerah kota Palembang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

H_{a1} = Ada pengaruh yang signifikan antara pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap pendapatan asli

Daerah kota Palembang pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang.

Pengujian ini dilakukan untuk mendapat nilai F_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan menggunakan standar α signifikan 5% (0,05) bila signifikan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai signifikan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta apabila F -hitung lebih besar dari signifikan 0,50 maka H_0 diterima H_a dan ditolak dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 diterima apabila T -hitung \geq dari T-tabel

H_0 ditolak apabila T -hitung $>$ dari T-tabel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu namanya adalah pajak daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut sebagai DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). Tingkat Dua yang sekarang ini disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik, keputusan walikota Palembang nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

2. Struktur Organisasi

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonstrasi dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.

- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
- 8) Melakukan urusan tata usaha

b. Susunan organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ditetapkan dalam Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah. Dimana susunan organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing unit.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terdiri dari :

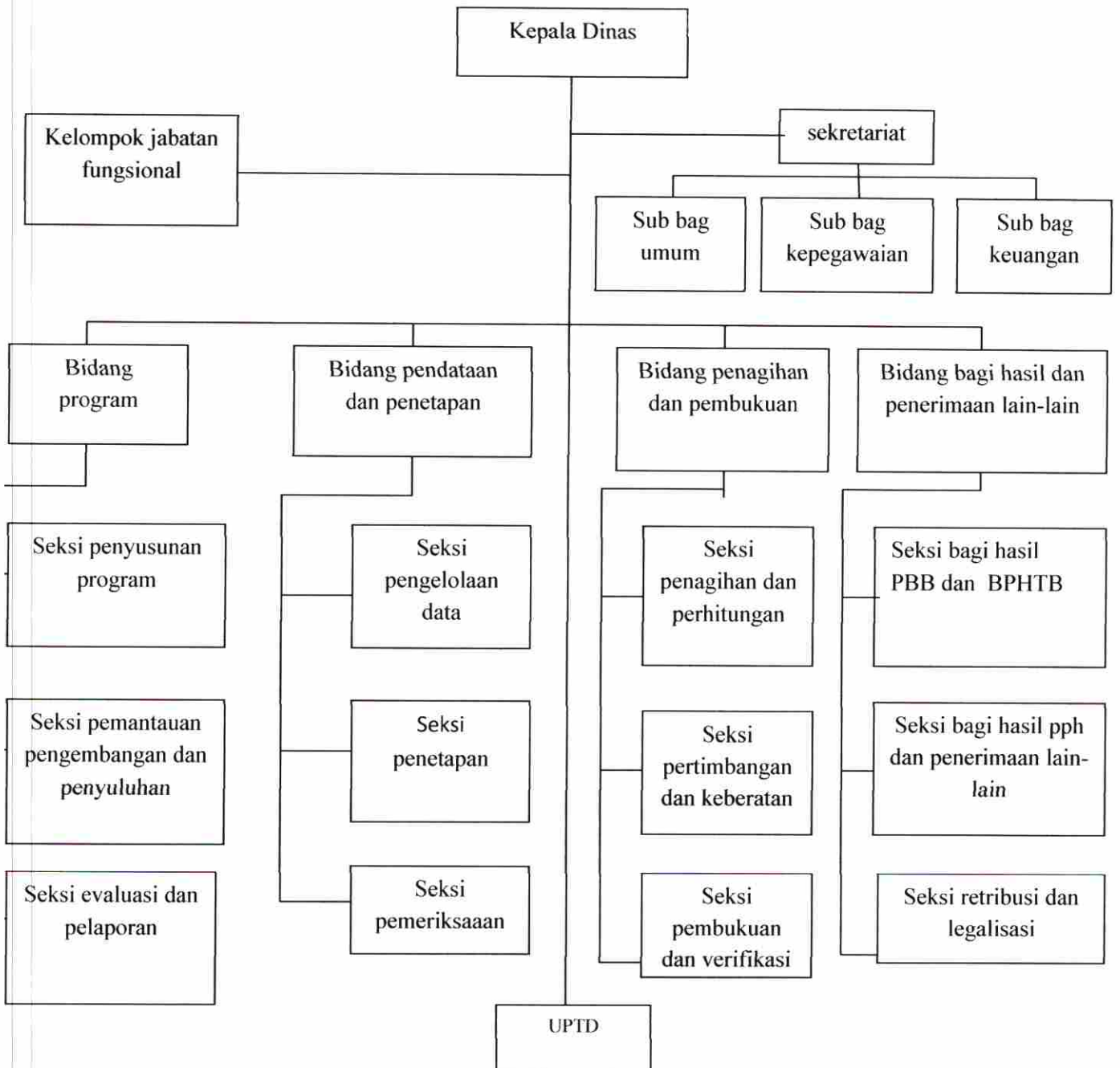
- 1) Kepala daerah
- 2) Wakil kepala dinas
- 3) Bagian tata usaha, membawahi :
 - a) Sub bagian umum
 - b) Sub bagian kepegawaian
 - c) Sub bagian keuangan
- 4) Sub dinas penagihan, membawahi :
 - a) Seksi pembukuan dan verifikasi

- b) Seksi penagihan dan perhitungan
 - c) Seksi retribusi dan pemindah pembukuan
 - d) Seksi pertimbangan dan keberatan
- 5) Sub dinas penerimaan dan pendataan lain-lain, membawahi :
- a) Seksi penerimaan pajak
 - b) Seksi penerimaan retribusi
 - c) Seksi penerimaan dan pendataan lain-lain.
 - d) Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
- 6) Sub dinas bagi hasil pendapatan
- a) Seksi bagi hasil pajak
 - b) Seksi bagi hasil bukan pajak
 - c) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
- 7) Kelompok jabatan fungsional
- 8) Sub dinas program, membawahi :
- a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan
 - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c) Seksi pengembangan pendapatan
 - d) Seksi evaluasi dan pelaporan
- 9) Sub dinas pendataan penetapan, membawahi
- a) Seksi pendataan dan pendaftaran
 - b) Seksi pengolahan data informasi
 - c) Seksi penetapan
 - d) Seksi pemeriksaan

Gambar IV.1

Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



Sumber data : dinas pendapatan daerah, 2014

c. Tugas dan fungsi

Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- c) Pelaksanaan ke tata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketata usahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d) Pengkoordinasian, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- e) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Pembagian unit pelaksanaan teknik dinas.

2) Wakil kepala dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan kedalam
- b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat
- c) Penandatanganan naskah dinas yang ditempatkan oleh kepala dinas
- d) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian ketata usahaan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum. Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- b) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan

Bagian tata usaha terdiri atas :

(1) Sub bagian umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat kearsipan dan rumah tangga.

(2) Sub bagian kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan serta membuat pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

4) Sub Dinas Program

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan serta pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

Mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja
- b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
- c) Pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Sub dinas program terdiri atas :

(1) Seksi program dan penyuluhan

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(2) Seksi pemantauan dan pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(3) Seksi evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah

5) Sub dinas pendapatan dan penetapan

Melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah
- b) Melakukan pengelolaan data informasi
- c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak
- d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

6) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan kerabatan

Mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/ pembayaran/ penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.

- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah
- d) Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi
- e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

7) Sub dinas penerimaan dan pendaptan lain-lain

Mempunyai tugas penatausahaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain.
- b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah
- c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lainnya
- d) Melaksanakan legalisasi / pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri dari :

- (1) Seksi penerimaan pajak.
- (2) Seksi penerimaan retribusi

(3) Seksi penerimaan lain-lain

8) Sub dinas bagi hasil pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a) melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil bukan pajak
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil pajak
- d) Melakukan penyusutan peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari :

- (1) Seksi bagi hasil pajak
- (2) Seksi bagi hasil bukan pajak
- (3) Seksi peraturan perundang–undangan dan pengkajian pendapatan.

9) Cabang dinas

Cabang dinas mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional
- b) Melaksanakan unsur administrasi

10) Unit pelaksanaan teknik dan dinas

Tugas unit pelaksanaan teknik dinas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi

11) Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing-masing.

2. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan PAD

Tabel IV.1

Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah kota Palembang Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Bulan	X ₁	X ₂	X ₃	Y
2009	Januari	590.014.856	341.800.485	378.138.413	6.903.810.092
	Februari	501.269.743	280.538.595	266.863.723	7.077.405.243
	Maret	1.330.743.575	220.040.530	316.648.025	9.512.442.512
	April	876.215.927	439.815.105	423.177.152	7.820.766.465
	Mei	711.390.780	379.251.500	269.437.463	6.225.401.969
	Juni	1.017.201.709	360.363.525	486.133.656	8.251.875.903
	Juli	974.099.092	468.132.365	359.424.647	8.619.514.839
	Agustus	944.474.200	373.969.470	301.868.665	6.560.943.386
	September	477.237.391	303.625.625	304.423.206	8.512.585.294
	Oktober	881.587.873	300.507.039	474.813.281	9.876.248.434
	November	1.039.051.479	355.223.590	300.758.755	9.282.488.800
	Desember	1.010.460.999	538.890.675	343.595.848	13.749.247.804
2010	Januari	820.371.583	496.100.725	236.557.757	7.402.897.990
	Februari	913.485.054	437.370.745	297.828.998	7.812.560.320
	Maret	1.223.331.665	370.109.718	323.030.453	8.312.000.400
	April	1.544.439.857	417.194.978	405.618.033	7.982.720.020
	Mei	1.180.640.757	387.149.782	289.762.965	8.632.166.220
	Juni	1.260.273.685	547.485.764	602.034.100	8.880.640.500
	Juli	1.139.610.882	514.856.325	432.011.945	9.232.344.120
	Agustus	868.882.094	479.981.695	548.116.055	8.600.430.750
	September	988.354.732	358.116.903	337.267.686	9.112.077.312
	Oktober	1.481.373.814	390.018.694	305.876.022	10.675.783.201
	November	1.505.011.383	441.678.438	522.758.751	12.446.700.300
	Desember	1.168.925.099	273.043.972	302.677.398	14.116.112.640
2011	Januari	880.543.167	335.870.954	287.910.777	7.987.665.376
	Februari	953.667.772	370.899.900	296.348.080	7.992.554.906
	Maret	1.324.556.870	420.987.670	321.767.099	8.532.849.070
	April	1.432.667.887	421.088.776	370.886.774	8.945.822.963
	Mei	1.245.887.200	467.334.290	420.776.908	7.651.899.022
	Juni	1.136.780.965	517.866.340	348.077.690	8.653.908.267
	Juli	1.288.656.099	430.887.669	450.889.665	9.545.872.905
	Agustus	980.776.500	308.872.199	367.878.009	8.784.312.967
	September	1.020.995.667	459.865.012	328.667.070	9.693.546.209
	Oktober	1.256.389.902	376.909.776	387.977.665	11.076.549.802
	November	1.489.088.343	456.667.989	458.909.779	12.899.844.777
	Desember	1.345.890.767	478.900.719	378.856.432	14.698.397.690

2012	Januari	928.238.088	478.965.343	319.297.650	8.026.640.598
	Februari	956.440.882	437.659.725	365.954.088	8.129.653.077
	Maret	1.256.783.088	412.679.884	379.055.743	8.319.775.932
	April	1.439.855.409	385.466.780	479.640.045	7.886.432.009
	Mei	1.367.099.678	398.704.643	378.664.202	8.421.660.220
	Juni	1.236.788.656	412.788.044	356.883.900	9.543.210.335
	Juli	1.190.456.887	437.800.976	387.664.832	7.641.205.452
	Agustus	987.660.932	510.766.434	452.080.745	8.823.895.764
	September	1.004.765.900	392.558.664	367.088.453	9.774.269.712
	Oktober	1.576.820.110	405.773.122	378.456.180	11.290.615.395
	November	1.456.976.805	532.633.907	584.221.966	13.328.391.020
	Desember	1.238.904.336	327.755.432	408.654.981	15.910.289.576
2013	Januari	935.890.418	419.573.841	485.727.587	9.572.525.728
	Februari	957627.792	534.653.785	587.957.525	8.353.762.545
	Maret	980.776.346	454.253.326	347.572.982	9.361.389.498
	April	1.453.798.848	390.768.210	359.592.592	9.376.643.636
	Mei	1.783.675.210	435.938.914	475.582.958	8.632.902.887
	Juni	923.138.358	578.194.599	494.578.934	8.116.878.390
	Juli	1.284.328.482	562.949.572	389.496.690	9.772.178.906
	Agustus	1.473.284.325	495.201.185	399.386.938	11.421.077.982
	September	1.933.535.114	591.275.957	498.658.567	12.917.834.088
	Oktober	942.719.490	574.981.375	319.834.952	14.672.883.008
	November	1.542.104.993	459.588.529	329.349.592	16.721.088.743
	Desember	1.784.349.829	539.493.259	530.423.895	17.456.956.067

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2014

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Hubungan Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Korelasi berganda

Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan analisis hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang terdiri dari variabel pajak Hotel , Hiburan dan Reklame ditampilkan dalam tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2
Hasil Korelasi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 ^a	.267	.228	2236862137.278	.980

- a. Predictors: (Constant), PajakReklame (X3), PajakHotel (X1), PajakHiburan (X2)
b. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber : : Hasil Pengolahan Data ,2014

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program *Statistical Product and Service solution* (SPSS) versi 16.0 diperoleh koefisien korelasi berganda secara bersamaan sebesar 0,517 hal ini menunjukkan bahwa antara variabel pajak Hotel, Hiburan dan Reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang memiliki hubungan yang kuat karena koefisien korelasi (R) bernilai positif 0,517. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dapat diketahui sebesar 26,7 % Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dipengaruhi oleh pajak Hotel, Hiburan dan Reklame, sedangkan variabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Palembang sebesar 73,3% anatara lain dipengaruhi oleh Laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.

b. Korelasi Parsial

Hasil analisis korelasi parsial terhadap variabel-variabel pajak hotel, hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang dalam tabel IV.3 berikut ini :

Tabel IV.3
Hasil Analisis Korelasi Secara Parsial

		Correlations			
		PajakHotel	PajakHiburan	PajakReklame	PAD
Pajak Hotel (X1)	Pearson Correlation	1	.278*	.361**	.505**
	Sig. (2-tailed)		.032	.005	.000
	N	60	60	60	60
Pajak Hiburan (X2)	Pearson Correlation	.278*	1	.446**	.243
	Sig. (2-tailed)	.032		.000	.061
	N	60	60	60	60
Pajak Reklame (X3)	Pearson Correlation	.361**	.446**	1	.205
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.116
	N	60	60	60	60
PAD (Y)	Pearson Correlation	.505**	.243	.205	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.061	.116	
	N	60	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data , 2014

Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial yang terdapat pada tabel IV.3 diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut : pajak hotel korelasi parsialnya bernilai 1 artinya ada hubungan antara pajak hotel dan pendapatan asli daerah kota Palembang. Pajak hiburan korelasi parsialnya bernilai 0,278 artinya ada hubungan antara pajak hiburan dan pendapatan asli daerah kota Palembang. Pajak reklame korelasi

parsialnya bernilai 0,361 adanya hubungan antara pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

2. Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Untuk mengetahui bagaimana variabel bebas (pajak hotel, hiburan dan reklame) terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah kota Palembang) maka digunakan analisis dengan menggunakan peralatan statistik, yaitu model regresi berganda yang diolah dengan statistical product and service solution (SPSS) versi 16.0

Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Palembang terdiri dari pajak hotel (X_1), pajak hiburan (X_2) dan pajak reklame (X_3) akan ditampilkan pada tabel IV.4 berikut :

Tabel IV.4
Hasil analisis regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3736701214.136	1787628817.267		2.090	.041
	PajakHotel	4.041	1.044	.479	3.870	.000
	PajakHiburan	3.714	4.006	.120	.927	.358
	PajakReklame	.162	3.924	-.021	-.160	.873

a. Dependent Variable: PAD (Y)

sumber : data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 3736701214,136 + 4,041 X_1 + 3,714 X_2 + 0,162 X_3 + e$$

Hasil estimasi yang berbentuk dalam sebuah persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

$a = 3736701214,136$ adalah bilangan konstanta, artinya bila pajak hotel (X_1), pajak hiburan (X_2) dan pajak reklame (X_3) sama dengan 0, maka pendapatan asli daerah kota Palembang adalah sebesar nilai konstanta 3736701214,136

$b_1 = 4,041$ adalah koefisien regresi variabel Pajak Hotel, artinya apabila Pajak Hotel (X_1) meningkat, maka kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 4,041 % . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pajak hotel yang dapat dihimpun oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang, maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah kota Palembang.

$b_2 = 3,714$ koefisien regresi variabel pajak hiburan, artinya apabila pajak hiburan (X_2) meningkat, maka kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang sebesar 3,714 % . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pajak hiburan yang dapat dihimpun oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang, maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah kota Palembang.

$b_3 = 0,162$ adalah koefisien regresi variabel Pajak Reklame, artinya apabila Pajak Reklame (X_3) meningkat, maka kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pajak reklame yang dapat dihimpun oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang, maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah kota Palembang.

Hasil analisis dengan menggunakan persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi untuk variabel pajak hotel lebih dominan pengaruhnya dibandingkan dengan variabel lainnya. Artinya pajak Hotel memiliki kontribusi yang lebih besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang di bandingkan variabel lainnya.

Selanjutnya melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah pajak hotel (X_1), pajak hiburan (X_2) dan pajak reklame (X_3) akan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya, digunakan uji F dan Uji T untuk melakukan pengujian hipotesis, yaitu sebagai berikut :

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model persamaan linear $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$ yang diajukan dapat diterima dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan tingkat kepercayaan

95% atau $\alpha = 5\%$, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model persamaan yang diajukan dapat diterima, dan sebaliknya. Hasil F_{hitung} dan F_{tabel} dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10200872813719172	3	340029093790639060	6.796	.001 ^a
	Residual	28019892438654040	56	500355222118822090		
	Total	38220765252373212	59			

a. Predictors: (Constant), PajakReklame (X1), PajakHotel (X2), PajakHiburan (X3)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber : Hasil pengolahan data primer , 2014

Berdasarkan tabel IV.5, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel **pajak hotel (X₁), pajak hiburan (X₂), pajak reklame (X₃), adalah sebesar 6,796**, sedangkan F_{tabel} dengan taraf nyata (α) dengan penyebut $(n-k-1) = (60-3-1)$ dan pembilang $(k=3)$ dilihat dari table distribusi F adalah sebesar 2,769

Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, pada penelitian ini $f_{hitung} (6,796) < F_{tabel} (2,769)$ berarti ada pengaruh secara signifikan antara Pajak Hotel (X₁), Pajak Hiburan (X₂), Pajak Reklame (X₃), terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Y).

b. Uji t

Uji t secara parsial bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh masing-masing variabel independen seperti pajak hotel (X_1), pajak hiburan (X_2), dan pajak reklame (X_3) terhadap variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah (Y), yang diuji dengan tingkat signifikansi 0.05. Kriteria pada pengujian ini, yaitu jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika nilai *probability* t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut :

Tabel IV.6

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37367012 14.136	1787628817.26 7		2.090	.041
	PajakHotel	4.041	1.044	.479	3.870	.000
	PajakHiburan	3.714	4.006	.120	2.027	.358
	PajakReklame	.162	3.924	-.021	.160	.873

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : hasil pengolahan data, 2014

Berdasarkan tabel IV.6 diatas untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian, maka harus ditentukan terlebih dahulu t_{tabel} nya. Adapun cara menentukan t_{tabel} , yaitu dengan $N = 60$, jumlah variabel independen (k) = 3, dan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05

maka derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ = $(60-3-1)$ adalah 56 sebesar 2,003.

1) Pengaruh Variabel Pajak Hotel (X_1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Y)

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS for windows versi 16.0 diperoleh tabel coefficient seperti yang terdapat dalam Tabel IV.6 , dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pajak hotel (X_1) adalah sebesar 3,870, hal ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel} = (3,870) > (2,003)$, kesimpulannya ada pengaruh secara signifikan antara pajak hotel (X_1) terhadap pendapatan asli daerah kota palembang (Y), maka H_a diterima dan H_o ditolak.

2) Pengaruh Variabel Pajak Hiburan (X_2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Y)

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS for windows versi 16.0 diperoleh tabel coefficient seperti yang terdapat dalam Tabel IV.6 , dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pajak hiburan (X_2) adalah sebesar 2,027 hal ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,027 > 2,003$, kesimpulannya ada pengaruh secara signifikan antara pajak hiburan (X_2) terhadap pendapatan asli daerah kota palembang (Y), maka H_a diterima dan H_o ditolak.

3) Pengaruh Variabel Pajak Reklame (X_3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Y)

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS for windows versi 16.0 diperoleh tabel coefficient seperti yang terdapat dalam Tabel IV.6 , dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pajak reklame (X_3) adalah sebesar 0,160 hal ini berarti $t_{hitung} < t_{tabel} = 0,160 < 2,003$, kesimpulannya tidak ada pengaruh secara signifikan antara pajak reklame (X_3) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

C. Pembahasan

1. Uji F (Secara Bersama)

H_1 : Pengaruh Pajak Hotel (X_1), Pajak Hiburan (X_2), dan Pajak Reklame (X_3), Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Y).

Tabel IV.7
Hasil Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 ^a	.267	.228	2236862137.278	.980

a. Predictors: (Constant), PajakReklame (X3), PajakHotel (X1), PajakHiburan (X2)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber : hasil pengolahan data ,2014

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program spss for windows versi 16.0 seperti yang tertera di tabel IV.7 diperoleh

koefisien korelasi berganda secara bersamaan sebesar 0,517 hal ini menunjukkan bahwa antara variabel pajak hotel (X_1), pajak hiburan (X_2), dan pajak reklame (X_3), terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y) memiliki pengaruh yang signifikan karena koefisien korelasi (r) bernilai 0,517. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dapat diketahui sebesar 26,7% pendapatan asli daerah kota Palembang dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak hiburan dan reklame, sedangkan variabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Palembang sebesar 73,3%.

Tabel IV.8

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10200872813719172	3	340029093790639060	6.796	.001 ^a
	Residual	28019892438654040	56	500355222118822090		
	Total	38220765252373212	59			

a. Predictors: (Constant), PajakReklame (X1), PajakHotel (X2), PajakHiburan (X3)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber : hasil pengolahan data ,2014

Pada penelitian ini $f_{hitung} (6,796) > f_{tabel} (2,769)$ hal ini berarti ada pengaruh secara signifikan antara variabel pajak hotel (X_1), pajak hiburan (X_2), dan pajak reklame (X_3), terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y). Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima yaitu secara simultan tidak ada pengaruh secara signifikan

antara pajak hotel (X_1), pajak hiburan (X_2), dan pajak reklame (X_3), terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y).

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febri mandra, Universitas Islam Negeri syarif hidayatullah jakarta (2010) dengan melihat persamaan dan perbedaaan keduanya. Dilihat dari persamaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang pajak, sedangkan perbedaannya dalam penelitian sebelumnya membahas pengaruh pajak daerah (secara keseluruhan) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang pada dinas pendapatan daerah kota Palembang sedangkan penelitian ini membahas pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame dan pendapatan asli daerah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Karena adanya perbedaan variabel penelitian, maka kedua penelitian ini tidak bisa dibandingkan.

2. Uji t secara parsial

H₂₁ : Pengaruh Pajak Hotel (X₁) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Y)

Bisa dilihat dari tabel 1.1 maka besarnya pajak hotel dari tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan terendah adalah pada bulan Februari yaitu sebesar Rp. 501.269.743 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 1.330.743.575. Pada tahun 2010 pendapatan terendah adalah pada bulan Januari yaitu sebesar Rp. 820.371.583 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 1.544.439.857. Pada tahun 2011 pendapatan terendah adalah pada bulan Januari yaitu sebesar Rp. 880.543.167 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 1.489.088.343. Pada tahun 2012 pendapatan terendah adalah pada bulan Januari yaitu sebesar Rp. 928.238.088 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan oktober yaitu sebesar 1.576.820.110. Pada tahun 2013 pendapatan terendah adalah pada bulan Juni yaitu sebesar Rp. 923.138.358 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar Rp. 1.784.349.829.

Walaupun pendapatan dari pajak hotel selalu naik-turun, akan tetapi secara kumulatif dari tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 total pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp. 10.353.747.624 pada tahun 2010 meningkat menjadi

Rp. 12.993.700.545 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. Rp. 14.355.901.139 pada tahun 2012 Rp.14.640.790.771 meningkat menjadi pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.15.995.229.205

Pengaruh secara parsial variabel pajak hotel (X_1) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y) ditunjukkan pada tabel IV.6 sebesar 4,041 adalah koefisien regresi variabel pajak hotel, artinya kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang sebesar 4,041%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya penerimaan pajak hotel yang dihasilkan, maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah kota Palembang.

Berdasarkan hasil analisis secara parsial (uji t) diperoleh hasil t_{hitung} untuk variabel pajak hotel (X_1) adalah sebesar 0,599 hal ini berarti $t_{hitung} (3,870) > t_{tabel} (2,003)$, oleh karena itu ada pengaruh secara signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 diterima yaitu secara parsial ada pengaruh signifikan antara pajak hotel (X_1) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y)

Persamaan regresi ini hanya berlaku untuk 2009-2013 dikarenakan data yang disajikan adalah tiap bulan dari tahun 2009-2013, sehingga penambahan data dari tahun sebelumnya ataupun sesudahnya akan mengubah persamaan regresi tersebut

Hasil analisis secara parsial berarti mengukur variabel independen yang dalam hal ini pajak hotel terhadap variabel dependen yang dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah kota Palembang secara sendiri-sendiri dengan mengabaikan variabel lain-lain, untuk variabel dependen yang dipengaruhi cukup banyak oleh variabel independen, hasil yang didapat sesuai dengan fakta dilapangan. Karena pada kenyataannya sebuah kontribusi pajak sekecil apapun pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi dalam penelitian selalu ada taraf signifikansi yang mengukur seberapa signifikan sebuah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga akan ada batas-batas limit yang jika pengaruhnya terlalu kecil, maka akan diabaikan dan dianggap tidak berpengaruh walaupun fakta dilapangan tetap berpengaruh walaupun sangat kecil. Namun dalam penelitian ini dari hasil pengolahan data SPSS didapat hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.

H₂: Pengaruh Pajak Hiburan (X₂) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Y)

Bisa dilihat dari tabel 1.1 maka besarnya pajak hiburan dari tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan

terendah adalah pada bulan februari yaitu sebesar Rp.280.538.595 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan desember yaitu sebesar 538.890.675. Pada tahun 2010 pendapatan terendah adalah pada bulan september yaitu sebesar Rp.358.116.903 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan juni yaitu sebesar Rp.547.485.764 Pada tahun 2011 pendapatan terendah adalah pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp. 308.872.199 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan oktober yaitu sebesar Rp.576.909.676 Pada tahun 2012 pendapatan terendah adalah pada bulan desember yaitu sebesar Rp. 327.775.432 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan november yaitu sebesar 532.633.907 Pada tahun 2013 pendapatan terendah adalah pada bulan April yaitu sebesar Rp. 390.768.210 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan september yaitu sebesar 591.275.957

Walaupun pendapatan dari pajak hiburan selalu naik-turun, akan tetapi secara kumulatif dari tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2009 total pendapatan dari pajak hiburan sebesar Rp.4.366.168.504 pada tahun 2010 meningkat menjadi 5.113.107.739 pada tahun 2011 menurun menjadi 5.046.141.214 pada tahun 2012 meningkat menjadi 5.113.552.954 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.6.036.872.552

Pengaruh secara parsial variabel pajak hiburan (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) ditunjukkan pada tabel IV.6 sebesar 3,714 adalah koefisien regresi variabel pajak hiburan , artinya kontribusi pajak

hiburan (X_2) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang sebesar 3,714%..

Berdasarkan hasil analisis secara parsial (uji t) diperoleh hasil t_{hitung} untuk variabel pajak Hiburan (X_2) adalah sebesar 2,027 hal ini berarti t_{hitung} ($2,027$) $>$ t_{tabel} ($2,003$), oleh karena itu ada pengaruh secara signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 diterima yaitu secara parsial ada pengaruh signifikan antara pajak hiburan (X_2) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y)

Persamaan regresi ini hanya berlaku untuk 2009-2013 dikarenakan data yang disajikan adalah tiap bulan dari tahun 2009-2013, sehingga penambahan data dari tahun sebelumnya ataupun sesudahnya akan mengubah persamaan regresi tersebut

Hasil analisis secara parsial berarti mengukur variabel independen yang dalam hal ini pajak hotel terhadap variabel dependen yang dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah kota Palembang secara sendiri-sendiri dengan mengabaikan variabel lain-lain, untuk variabel dependen yang dipengaruhi cukup banyak oleh variabel independen, hasil yang didapat sesuai dengan fakta dilapangan. Karena pada kenyataannya sebuah kontribusi pajak sekecil apapun pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi dalam penelitian selalu ada taraf signifikansi yang mengukur seberapa signifikan sebuah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga akan ada batas-batas

limit yang jika pengaruhnya terlalu kecil, maka akan diabaikan dan dianggap tidak berpengaruh walaupun fakta dilapangan tetap berpengaruh walaupun sangat kecil. Namun dalam penelitian ini dari hasil pengolahan data SPSS didapat hasil bahwa pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.

**H2₃: Pengaruh Pajak Reklame (X₃) Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Palembang (Y)**

Bisa dilihat dari tabel 1.1 maka besarnya pajak reklame dari tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan terendah adalah pada bulan februari yaitu sebesar Rp.266.863.723 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan juni yaitu sebesar 486.133.656 Pada tahun 2010 pendapatan terendah adalah pada bulan januari yaitu sebesar Rp.236.557.757 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar Rp.602.034.100 Pada tahun 2011 pendapatan terendah adalah pada bulan januari yaitu sebesar Rp.287.910.777 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 458.909.779 Pada tahun 2012 pendapatan terendah adalah pada bulan januari yaitu sebesar Rp.319.297.650 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan november yaitu sebesar Rp.584.221.966 Pada tahun 2013 pendapatan terendah adalah pada bulan oktober yaitu sebesar

Rp.319.834.592 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada bulan februari yaitu sebesar Rp.587.957.525

Walaupun pendapatan dari pajak reklame selalu naik-turun, akan tetapi secara kumulatif dari tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 total pendapatan dari pajak reklame sebesar Rp.4.225.282.824 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.4.603.540.213 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.4.418.945.948 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.4.857.662.785 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.5.218.163.212

Pengaruh secara parsial variabel pajak Reklame (X_3) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y) ditunjukkan pada tabel IV.6 sebesar 0,630 adalah koefisien regresi variabel pajak Reklame, artinya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang sebesar 0,630%.

Berdasarkan hasil analisis secara parsial (uji t) diperoleh hasil t_{hitung} untuk variabel pajak reklame 0,906 (X_3) adalah sebesar 0,906 hal ini berarti t_{hitung} (0,160) < t_{tabel} (2,003), oleh karena itu tidak ada pengaruh secara signifikan antara pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pajak hotel (X_1) terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang (Y)

Persamaan regresi ini hanya berlaku untuk 2009-2013 dikarenakan data yang disajikan adalah tiap bulan dari tahun 2009-2013, sehingga

penambahan data dari tahun sebelumnya ataupun sesudahnya akan mengubah persamaan regresi tersebut

Hasil analisis secara parsial berarti mengukur variabel independen yang dalam hal ini pajak hotel terhadap variabel dependen yang dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah kota Palembang secara sendiri-sendiri dengan mengabaikan variabel lain-lain, untuk variabel dependen yang dipengaruhi cukup banyak oleh variabel independen, hasil yang didapat kadang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Karena pada kenyataannya sebuah kontribusi pajak sekecil apapun pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi dalam penelitian selalu ada taraf signifikansi yang mengukur seberapa signifikan sebuah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga akan ada batas-batas limit yang jika pengaruhnya terlalu kecil, maka akan diabaikan dan dianggap tidak berpengaruh walaupun fakta dilapangan tetap berpengaruh walaupun sangat kecil. Namun dalam penelitian ini dari hasil pengolahan data SPSS didapat hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya.

D. Hasil Penelitian

1. Upaya apa yang dilakukan pemerintah kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan Asli daerah melalui Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Reklame.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang saya teliti dapat disimpulkan bahwa Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak Hotel, Hiburan dan Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah tanpa henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang pajak daerah. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran para wajib pajak.
- b. Upaya berikutnya yang dilakukan pemerintah kota Palembang yaitu dengan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak.
- c. Melaksanakan sistem pemantauan dilapangan oleh petugas Dispenda kepada wajib pajak Hotel dan wajib pajak Hiburan. Pemantauan dilakukan dengan surat tugas atau dengan cara memata-matai kegiatan di hotel dan ditempat hiburan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang tingkat hunian/jumlah tamu dan untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh wajib pajak hotel dan hiburan
- d. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak Hotel, Hiburan dan Reklame dalam hal pembukuan dan pencatatan yang berhubungan

dengan hotel, hiburan dan Reklame untuk menghindari manipulasi data oleh wajib pajak hotel, hiburan dan reklame serta untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak Hotel, Hiburan dan Reklame dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- e. Melakukan kebijakan dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan sarana dan prasarana dengan tujuan untuk meningkatkan potensi pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A.Simpulan

Berdasarkan analisis kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan computer melalui program SPSS (*statistical product and service solution*) versi 16.0 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji f secara simultan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Sedangkan pajak Reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Hal ini menunjukkan bahwa kesimpulan uji secara parsial dapat diterapkan pada persamaan regresi yang melibatkan banyak variabel independen. dalam uji parsial selalu mengabaikan variabel lain yang juga mempengaruhi variabel dependen, sehingga belum tentu naik-turun variabel dependen disebabkan oleh semata-mata naik turunnya salah satu variabel independen yang diuji.
3. Upaya pemerintah kota Palembang untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah melalui pajak hotel, hiburan dan reklame dilakukan melalui sosialisasi, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak,

melakukan kerjasama dengan perusahaan, melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak Hotel, Hiburan dan Reklame, serta memberikan sanksi yang tegas.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas pendapatan daerah kota Palembang lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan, karena dari data statistik pada tabel I.1 peningkatan pajak reklame dan pajak hiburan dari tahun 2009-2013 tidak begitu signifikan
2. Untuk peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian yang melibatkan banyak variabel independen, sebanyak mungkin variabel tersebut digunakan, semakin banyak variabel independen yang digunakan semakin valid hasil penelitian
3. Kelemahan penelitian ini terlalu sedikit menggunakan variabel independen sehingga kesulitan menentukan hasil penelitian karena variabel lain yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Ramelan Karseno. 2005. **Makalah Persoalan - Persoalan Dalam Implementasi Otonomi Daerah**. FE UNS Surakarta
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 2014 . **Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 2009-2013**.
- Dinas pendapatan daerah kota palembang. 2014. **Peraturan daerah tentang pajak hotel nomor 11 tahun 2010**.
(<http://dispenda.palembang.go.id>, diakses 25 mei 2014)
- Elita Dewi. 2011. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung .
(<http://portal.kopertis2.or.id:8080/jspui/bitstream/123456789/296/1/Jurnal%20Maulan%20Irwadi%20OCPUS%202013.doc>, diakses 5 juni 2014)
- Febri Mandra. 2010. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2011. **Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan**,
(<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23832/1/Febri%20Mandra%20%20106084003601.pdf>, diakses 5 juni 2014).
- Liliawati Eugania M. 2010. **Peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah**. PT Harvindo. Jakarta
- Nan Lin, ahli bahasa W. Gulo. 2007. **Metode penelitian**, Penerbit grasindo, Jakarta
- Sugianto, 2008. **Pajak dan retribusi daerah**, penerbit grasindo jakarta
- Sugiyono, 2008. **Metode Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wirawan Ilyas, 2009. **Hukum Pajak**, edisi revisi, salemba empat, Jakarta



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpi-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin / 18 Agustus 2014
Waktu : 08.00-12.00 WIB
Nama : Firdaus
Nim : 222010033
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul : **PENGARUH PAJAK HOTEL, HIBURAN DAN REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Hasyim, H., S.E., M.Si	Pembimbing	4/8 2014	
2	H.M. Basyaruddin, R, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	16/8 2014	
3	Hasyim, H., S.E., M.Si	Penguji 1	4/8 2014	
4	Mizan, S.E., M Si., Ak	Penguji 2	3 sept 2014.	

Palembang,.....

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352282 Faximili (0711) 317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : www.dispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 1056 /Dispenda-I/VII/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. BUKMAN LIAN, MM. M.Si
NIP : 19580716 197912 1 002
Pangkat/gol : Pembina Tingkat I/ IV.b
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama : FIRDAUS
Nim : 22 2010 033
Jurusan : Ekonomi

Telah melaksanakan Pengambilan Data terkait penelitian Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 09 Mei 2014 sd 09 Juni 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 23 Juli 2014

an. **KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS,**



Drs. H. BUKMAN LIAN, MM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 195807161979121002

Correlations

Correlations

		PajakHotel	PajakHiburan	PajakReklame	PAD
Pajak Hotel (X1)	Pearson Correlation	1	.278*	.361**	.505**
	Sig. (2-tailed)		.032	.005	.000
	N	60	60	60	60
Pajak Hiburan (X2)	Pearson Correlation	.278*	1	.446**	.243
	Sig. (2-tailed)	.032		.000	.061
	N	60	60	60	60
Pajak Reklame (X3)	Pearson Correlation	.361**	.446**	1	.205
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.116
	N	60	60	60	60
PAD (Y)	Pearson Correlation	.505**	.243	.205	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.061	.116	
	N	60	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Asumsi Klasik

Autokorelasi

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PajakHotel	.853	1.173
	PajakHiburan	.785	1.274
	PajakReklame	.740	1.352

a. Dependent Variable: PAD

Multikolinearitas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.517 ^a	.267	.228	2236862137.278	.980

a. Predictors: (Constant), PajakReklame, PajakHotel, PajakHiburan

b. Dependent Variable: PAD

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.517 ^a	.267	.228	2236862137.278

a. Predictors: (Constant), PajakReklame, PajakHotel, PajakHiburan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10200872813719172	3	340029093790639060	6.796	.001 ^a
	Residual	28019892438654040	56	500355222118822090		
	Total	38220765252373212	59			

a. Predictors: (Constant), PajakReklame, PajakHotel, PajakHiburan

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3736701214.136	1787628817.267		2.090	.041
	PajakHotel	4.041	1.044	.479	3.870	.000
	PajakHiburan	3.714	4.006	.120	2.027	.358
	PajakReklame	.162	3.924	-.021	.160	.873

a. Dependent Variable: PAD

t_{tabel} : 2,003

F_{tabel} : 2,769



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FIRDAUS	PEMBIMBING
NIM : 22 2010 033	KETUA : HASYIM, H, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PAJAK HOTEL, HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	30-6-2014	Bab I s/d III	<i>[Signature]</i>		Perbah.
2	7-7-2014	Pembahasan Bab IV	<i>[Signature]</i>		Perbah.
3	15-7-2014	Pembahasan Bab IV s/d V	<i>[Signature]</i>		Perbah.
4	22-7-2014	Perb Bab IV s/d V	<i>[Signature]</i>		Perbah.
5	23-7-2014	Perb IV & V kee	<i>[Signature]</i>		ke
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
Program Studi



ROSALINA GHAZALI, S.E., Ak., M.Si

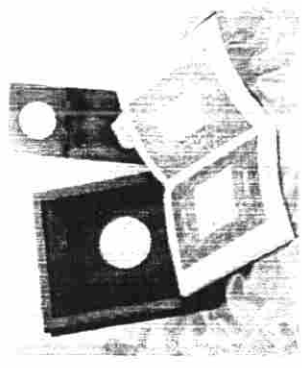
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : FIRDAUS
NIM : 222010033
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 24 Juli 2014

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami



LEMBAGA BAHASA DAN PENGEMBANGAN KARIR (LBPK)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Jabungan dengan akan dilaksanakannya ujian Komprehensif di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, maka mahasiswa dengan nama dibawah ini telah mengikuti Tes TOEFL, untuk di bolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	Firdaus	22 2010 033

Surat Keterangan Ini di Laporkan ASLI,

Tidak Boleh difotocopy dan hanya berlaku sampai dengan **31 AGUSTUS 2014**

Palembang, 15 Juli 2014
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Drs. Sunardi, SE, M.Si
NIDN : 0206046303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

PIA G A M

No.392/H-4/PPKKN/UM/PIIX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang
menerangkan bahwa :

Nama : Firdaus
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2010 033
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Tempat Tgl. Lahir : Pagar Alam, 12-10-1989

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-6 yang dilaksanakan dari tanggal
23 Januari sampai dengan 06 Maret 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Tebat Agung
Kecamatan : Rambang Dangku
Kota/Kabupaten : Muara Enim
Dengan Nilai : (A)

Mengetahui



Firdaus, S.E., M.Si.



Palembang, 28 M a r e t 2014
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Ir. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama : Firdaus
NIM : 22 2010 033
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar alam, 12 oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua
 a. Ayah : Ali
 b. Ibu : Rosdiana
Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Wiraswasta
 b. Ibu : Ibu rumah tangga
Alamat : Jalan Siaran Irg Kavling nomor 1002 Rt 19
 Rw 08 Kelurahan Sako Kecamatan Sako
 Palembang

Penulis, Juli 2014

(Firdaus)